

BAB III

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN AFNEI

3.1 Pengalihan Tugas SWPC Terhadap SEAC

Konferensi Potsdam menghasilkan suatu keputusan, Amerika Serikat memutuskan, perubahan tugas dan wewenang yang dijalankan dua komando Sekutu bawahannya. Semula wilayah Hindia Belanda, kecuali Pulau Sumatera, dimasukkan ke dalam wilayah pendaratan pasukan Amerika Serikat, di bawah pimpinan Jenderal Mac Arthur, Panglima South West Pacific Command (SWPC). Realisasi perubahan dilangsungkan, kegiatan seperti pendaratan dan pendudukan Hindia Belanda di serah terima kepada pundak kesatuan pasukan Inggris dalam komando South East Asia Command (SEAC) dibawah pimpinan Laksamana Madya Lord Louis Mountbatten.

Laksamana Moubatten menyadari ada suatu pekerjaan yang akan diembannya dengan penuh tantangan. “The Supreme Allied Commander had now to shoulder responsibility for an area larger than any British Commander had ever held before.”¹ Moubatten harus memikul tanggung jawab yang lebih luas dari yang pernah dimiliki komandan Inggris manapun sebelumnya.

Keberlangsungan Konferensi Postdam berpengaruh kedalam stabilitas politik dan beberapa perundingan yang dilakukan dalam periodisasi perang dunia ke-II. Amanat yang disiarkan agar tercipta kedamaian antar bangsa dengan wujud pratik kolaborasi antar bangsa dan menghindari pertumbuhan darah yang meresahkan bahkan hingga memakan korban jiwa yang tidak sedikit.

¹ David Wehl. *Op.Cit.* p. 33

Keberlangsungan perang setidaknya berdampak bagi kehidupan manusia di muka bumi terutama di zona perang. Permasalahan perang dunia II perlu dituntaskan. Upaya gerakan dilahirkan sekutu melalui agenda diplomasi dengan mengadakan pertemuan di kota Postdam.² Kota kecil yang berlokasi 25 Km disebalah barat daya kota Berlin. Pertemuan dilakukan pada tanggal 26 juli 1945 sampai 2 Agustus 1945, di prakasai oleh presiden Amerika Serikat terpilih Harry Troman, pemimpin Uni Soviet Stalin, dan perdana menteri Inggris Winsthon Courchill.³ Pada kesempatan ini hadir pula para Menteri Luar Negeri, kepala Staf, Penasihat-penasihat, dan para ahli strategi. Konsekuensi untuk menjaga marwah hasil Konferensi Yalta 4-11 Februari 1945 dijaga sebagai upaya untuk menghasilkan kesepakatan kembali pada konferensi Postdam. Tiga besar negara sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, berjanji akan tetap konsekuen melaksanakan apa yang telah disepakatai dalam konferensi Yalta 4-11 Februari 1945.

Kelahiran kesepakatan dalam agenda diplomasi atau konferensi yang di lakukan di kota Postdam merupakan rangkaian panjang yang telah dilangsungkan yaitu pertama, perjanjian Altlantic Charter tanggal 14 Agustus 1945 dan kedua, konfersi Yalta tanggal 4 Februari 1945 sampai 11 Februari 1945 yang mempengaruhi keadaan politik dunia.

Kesepakatan bersama lahir yang dikenal dengan perjanjian Atlantic Charter atas pertemuan pada 14 Agustus 1945 di kapal induk Augusta yang

² Pelaksanaan konferensi di kota Postdam dirujuk untuk penamaan konferensi tersebut, yaitu Konferensi Postdam dan menjadi cikal monumental dalam stabilitas politik dunia di periodisasi perang dunia ke-II

³ Yoseph. *Op.Cit.* hlm 56

bersandar di kawasan Samudera Atlantic antara Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill.⁴

Kesepakatan kedua pimpinan negara, meliputi kepentingan warga dunia, di antaranya: Amerika Serikat dan Inggris, sepakat tidak akan melakukan invasi terhadap wilayah lain dalam meningkatkan perluasan wilayahnya dan lain-lain yang sejenis. Tidak ada perubahan wilayah, yang tidak sesuai dengan kehendak merdeka dari rakyat dan negara yang bersangkutan. Menjunjung tinggi hak-hak segala bangsa, dalam menentukan bentuk pemerintahan, serta melindungi hak-hak segala bangsa. Negara yang dirampas dengan kekerasan senjata, harus segera dikembalikan kepada yang berhak. Dikemudian hari dapat terjalin kerjasama antar bangsa di berbagai bidang semisal ekonomi, perburuhan, keadilan masyarakat dalam mencapai kepentingan semua warga dunia.

Uni Soviet sebagai anggota Sekutu, menyediakan tempat pertemuan di kota Yalta, sebuah kota kecil di Pulau Krim, tempat wisata di laut Hitam. Pada tanggal 4 Februari 1945 sampai 11 Februari 1945, pertemuan Tiga Besar pimpinan Sekutu di kota Yalta, sehingga merujuk penamaannya sebagai Konferensi Yalta. Tiga besar yang terdiri dari Presiden Amerika Serikat Roosevelt, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan Pemimpin Uni Sovyet Stalin (Yoseph).⁵ Pertemuan ini dilangsungkan dalam pembahasan masalah perang dan upaya menyelesaikan.

⁴ *Ibid.* hlm. 50

⁵ *Ibid.* hlm. 53

Perang Asia Timur Raya dan Perang Pasifik, mencapai tahap akhir. Deklarasi Potsdam disampaikan kepada Pemerintah Jepang, berisi antara lain: Jepang harus meninggalkan wilayah-wilayah yang didudukinya. Jepang harus segera menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Seluruh Tentara Jepang harus dilucuti. Mereka yang berada di luar wilayah Jepang, oleh Sekutu akan dipulangkan ke negara Jepang. Industri-industri untuk keperluan perangnya, akan dihancurkan. Posisi wilayah Jepang, akan dikembalikan ke empat pulau terbesar, sesuai dengan negara kepulauan Jepang semula. Untuk sementara, pulau-pulau yang strategis di Jepang akan diduduki Tentara Sekutu, sampai Jepang dapat melaksanakan pemilihan bebas, berhasil memilih sendiri pemerintahan yang demokratis dan cinta damai. Seketika Jepang merespon dengan menyiarkan penolakannya terhadap ancaman Sekutu. Bahkan dengan semangat Bushido yang tersisa, Jepang menyatakan akan terus berperang melawan Sekutu, sampai titik darah yang penghabisan.

Sekutu kehilangan kesabarannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat Harry Truman mengumumkan, akan menjatuhkan Bom Atom di negeri Jepang. Bukan sekedar ancaman, dengan menggunakan pesawat pembom B29 Amerika Serikat, pada tanggal 7 Agustus 1945, Bom Atom pertama, menghancurkan-leburkan kota besar Hiroshima. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Bom Atom kedua, menghancurkan-leburkan kota besar Nagasaki. Maka, hancur luluhlah moral balatentara Jepang di seluruh negeri yang sedang didudukinya. Hal ini mengakhiri Perang Dunia II.⁶

⁶ *Ibid.* hlm. 59-61

Inggris sebagai bagian dari pasukan sekutu dan pemenang Perang Dunia II, ditunjuk oleh negara-negara sekutu untuk melakukan pengalihan kekuasaan dari Jepang.⁷ Jepang pada 15 Agustus 1945 kepada sekutu di kapal USS Missouri menandatangani penyerahan tanpa syarat. Dalam perjanjian diputuskan mengenai wilayah Indonesia (Hindia Belanda) secara langsung menjadi tanggung jawab pasukan Inggris dibawah Komando SEAC.⁸

Laksamana Lord Louis Mountbatten selaku panglima merespon atas pengalihan tugas terhadap SEAC yang akan dilaksanakan dikemudian hari. Biografi bertajuk Mounbatten karya Philip Ziegler yang terbit pada 1985 melukiskan suasana tersebut. Tugas yang akan diemban membuatnya terkejut karena wilayah yang nantinya akan dikendalikan bertambah setengah juta mil persegi dari semula satu juta mil persegi. Atas hal itu berdampak pula pada jumlah penduduk yang akan di urus menjadi 128.000.000 orang. Terdapat juga 120.000 tawanan perang warga sekutu dan 750.000 mantan prajurit jepang yang harus dikumpulkan dari seluruh Asia Tenggara dan dipulangkan ke negaranya setelah perang berakhir. Kawasan yang akan dituju merupakan bekas perang yang notabennya tidak memiliki perangkat administrasi sipil dan atas hal itu harus segera memulihkan ketertiban, membangun kembali perekonomian, sekaligus mendirikan perangkat pemerintahan sipil untuk

⁷ Disjarahdam, *Op. Cit.* hlm. 6

⁸ John R.W Smail, *Bandung Awal Revolusi 1945-1946*. Depok: Ka Bandung. 2011. hlm.

mempersiapkan diserahkannya kembali wilayah Asia Tenggara kepada bekas penguasanya.⁹

Penugasan mendadak tersebut langsung dipikul oleh Laksamana Mounbatten ketika dia memasuki markas besar SEAC di Singapura setelah pindah dari kandy, Sri Lanka. Selaku panglima SEAC, wilayahnya saat itu paling luas di seluruh dunia, membentang dari Burma sampai Papua, dari Hanoi sampai Pulau Timor. Meskipun keputusan itu akhirnya dibuat di Postdam, persoalan batas kekuasaan masing-masing dari SWPC dan SEAC telah menjadi masalah pokok yang menimbulkan semakin banyak lobbying dan intrik di kalangan panglima militer sekutu dan para pendukung politik mereka masing-masing di Washington, London, dan Den Haag.¹⁰

SEAC sangat kekurangan personalia, kapal, sarana prasarana, hubungan dan berkas intelijen yang diperlukan untuk menangani tugas yang tiba-tiba menumpuk di hadapannya. Tanah seluas setengah juta mil persegi sekarang sekonyong-konyong ditambahkan kepada satu juta mil persegi yang sudah berada di bawah Wilayah komando nya. 80 juta rakyat ditambahkan kepada 45 juta yang sebelumnya sudah berada di bawah tanggung jawabnya. 2000 mil ditambahkan kepada sistem Perhubungan yang sudah terlalu luas. Kekacauan ini ditambah oleh kenyataan bahwa pemindahan wilayah secara

⁹ Julious Pour, *Djakarta 1945 : Awal Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta Bhuana Ilmu Populer. 2013. hlm. 342

¹⁰ Ben Anderson, *Revoloesi Pemoeda : Pendudukan Jepang Dan Perlawanan Di Jawa*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 1988. hlm. 165

resmi baru dilaksanakan pada hari kekalahan Jepang yang secepatnya di luar dugaan.¹¹

3.2 Misi Internasional SEAC Di Indonesia

Menyerahnya Jepang tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 di kapal USS Missouri dan menyepakati isi perjanjian Postdam berdampak pada pencetusan pelaksanaan Misi Internasional. Sekutu berkeinginan menjunjung tinggi hak-hak segala bangsa, untuk memilih bentuk pemerintahan, serta melindungi hak-hak segala bangsa tanpa adanya peperangan. Pelaksanaan misi Internasional yang diemban SEAC yaitu

- 1) Menerima Penyerahan pasukan Jepang dan menegakkan syarat penyerahan tanpa syarat;
- 2) Untuk melucuti dan memusatkan persiapan Jepang untuk pemulangan
- 3) Untuk membangun dan memelihara kondisi damai sebagai persiaoan untuk menyerahkan wilayah kepada pemerintah sipil masing-masing
- 4) Untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penjahat perang.¹²

Satuan khusus diopersikan dalam pelaksanaan misi internasional. Luasnya pelaksanaan misi internasional SEAC berdampak dalam pemilihan skema ini. Mengenai urusan pendudukan di wilayah Hindia Belanda dibentuk Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI).

Pembentukan AFNEI memiliki suatu landasan yang melatarbelakangi pendiriannya. Beberapa alasan pertimbangan, menurut Pollman dalam Suyami pertimbangan pertama karena keterbatasan pengapalan (*shipping*),

¹¹ *Ibid.*

¹² David Wehl, *Loc. Cit.*

pengapalan diperlukan dengan tujuan utama yaitu Pertama, keberangkatan militer Inggris ke berbagai daerah untuk pelaksanaan tugas. Kedua, pembebasan Allied Prisoners of War and Internees (APWI) dan mengembalikan orang Jepang ke negara asalnya. Ketiga, kurangnya ketersediaan logistik semisal, makanan dan obat hampir di tujuan wilayah. Faktor kesulitan lainnya keterbatasan kapal pengangkut tahanan perang ke Eropa dan mereka tidak menuju ke titik awal keberangkatan di wilayah South East Asia Command (SEAC) dan luas penyebaran para tahanan dan interniran tersebar di 227, itu pun atas data kamp yang terlacak, belum lagi yang tidak terdata. Jika diakumulasikan keseluruhan pengungsi Eropa di Asia Tenggara adalah 245.000.¹³ Pertimbangan kelima, jauhnya jarak, cakupan dan intensitas cuaca buruk yang menjadi kesulitan. Komando, termasuk kamp-kamp tesebar hingga pulau terpencil dan dipisahkan oleh ribuan mil. Pengaruh kesehatan pun menjadi kendala atas ketersediaan obat-obatan yang minim. Di Indo-Cina, Siam, Sumatra, Kalimantan, dan terutama di Jawa, kamp-kamp yang penuh sesak menahan ribuan orang Eropa yang ditahan. Masalah pangan, masalah rehabilitasi, masalah kepolisian, masalah transportasi, semuanya menuntut perhatian. Semuanya secara tragis terjadi kekurangan logistik.¹⁴

Louis Mounbatten mulai terkait dengan kawasan Asia Tenggara sejak berlangsung pertemuan di Postdam, Jerman, pada Juli 1945. Pertemuan puncak seluruh panglima perang sekutu tersebut merumuskan ultimatum

¹³ Suyami, *Loc. Cit.*

¹⁴ David Wehl, *Op.Cit.* p. 33

terakhir kepada Jepang. Dalam posisi selaku Panglima SEAC, Mounbatten menerima informasi rahasia dari Jenderal Marshall, menteri pertahanan Amerika Serikat, “Kami saat ini telah berhasil membuat bom atom yang dapat mempercepat takluknya Jepang.” Pucuk pimpinan Sekutu juga menyepakati perluasan wilayah yang ditempatkan di bawah kendali SEAC sehingga juga akan mencakup wilayah jajahan Prancis di Indochina dan bekas Hindia Belanda.¹⁵

AFNEI dibawah komando Letnan Jenderal Phillip Christison. Pelaksanaan tugas dilapangan merujuk pada tugas yang diemban SEAC sesuai hasil Konferensi Postdam namun dengan lingkup wilayah di Indonesia. Moubatten kembali membentuk RAPWI (Recovery Allied Prisoners of War and Internees) dalam urusan tahanan perang dan interniran. Dirasa Indonesia (Hindia Belanda) memiliki luas wilayah yang besar dan untuk mempermudah AFNEI dalam upaya menyelesaikan persoalan APWI. RAPWI termuat dalam bagian Allied Military Administration Civil Affairs.¹⁶

RAPWI bekerja dengan komando dari AFNEI dengan menjalankan tugas yang berpusat pada repatriasi APWI. AFNEI juga membawahi tiga Divisi Pasukan India, yaitu Divisi India ke-23 (Batavia, Bandung, dan Semarang), Divisi India ke-5 (Surabaya), Divisi India ke-26 (Sumatera), dan untuk pelaksanaan tugas di wilayah Indonesia lainnya seperti Sulawesi, Kalimantan dan pulau lainnya menjadi tanggung jawab bersama.¹⁷

¹⁵ Julius Pour. *Loc. Cit.*

¹⁶ *onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen*, hlm. 1

¹⁷ Suyami, *Op.Cit.* hlm. 4

Tugas yang dibebankan kepada AFNEI yaitu pertama, melindungi dan menjalankan pemindahan tawanan perang dan orang-orang interniran, yang diselenggarakan oleh RAPWI (Rehabilitation Allied Prisoners of War). Kedua, melucuti tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke tanah airnya. Ketiga, memelihara ketertiban dan keamanan agar supaya termaksud di atas dapat dilaksanakan.¹⁸

Dalam kesaksian Helfrich, Enquete-commissie, hlm 658-659 terkait kekurangan-kekurangan pasukan dan kesulitan-kesulitan logistik, untuk sementara menyebabkan tidak mungkin untuk melaksanakan maksud-maksud ini dengan segera, Mountbatten memutuskan pada suatu konferensi Inggris-Belanda yang dilangsungkan di Singapura pada tanggal 10 Oktober untuk menguasai lebih dahulu jalan raya Jakarta-Bogor-Bandung dan menduduki Bandung itu sendiri. Pemusatan gerakan militer Sekutu yang pertama di Jawa Barat, dan penyebarannya yang jauh lebih lambat ke Jawa Tengah dan Timur, adalah suatu alasan yang besar mengapa orang-orang Indonesia memberikan reaksi yang begitu berbeda di daerah-daerah ini.¹⁹

Penyerdehanaan tujuan diambil karena terbatasnya kekuatan AFNEI dibandingkan dengan luas cakupan wilayah yang harus ditangani. Fokus pasukannya untuk merebut area-area kunci, yakni kota-kota pelabuhan termasuk Jakarta, Surabaya, Medan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar upaya pemulangan para tawanan perang dan tentara Jepang menjadi lebih

¹⁸ Disjarah. *Op. Cit*

¹⁹ Ben Anderson. *Op. Cit.* hlm. 163

mudah. Penyerdehanaan misi diperhatikan untuk wilayah Indonesia (Hindia Belanda) oleh Mountbatten melihat situasi dan kondisi perlawanan yang signifikan akibat adanya sentimen anti-Eropa yang kuat. Di samping Indonesia (Hindia Belanda) dalam persiapan proklamasi kemerdekaan akibat hak istimewa yang diberikan Jepang untuk membentuk panitia persiapan kemerdekaan hingga adanya informasi kekalahan Jepang atas sekutu dalam Perang Dunia II.

3.3 Kontrak Politik Dengan NICA

Civil Affairs Agreement Pada tanggal 24 Agustus 1945 di tandatangi oleh NICA dan Inggris di Chequers, tempat kediaman resmi Perdana Menteri Inggris. Pemerintah Inggris berjanji, akan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda atas wilayah Hindia Belanda.²⁰ Hal ini bertolak belakang atas poin pembahasan dan hasil misi internasional. Pertanda upaya untuk melakukan perluasan wilayah kembali. Pembentukan AFNEI merujuk hasil yang ingin dicapai atas beberapa kesepakatan atau perjanjian terdahulu seperti perjanjian Atlantic Charter pada 14 Agustus 1941, konferensi Yalta pada 4 – 11 Februari 1945 dan konferensi Postdam 26 Juli - 2 Agustus 1945. Perdamaian dunia ingin diciptakan dan adanya kolaborasi antar negara di berbagai bidang dan setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, hak-hak semua bangsa harus di junjung tinggi dan harus dilindungi.

²⁰ Yoseph. *Op. Cit.* hlm. 67

Dalam Margaret George, (1986:51) mengungkapkan pada Maret 1942 ketika keadaan Hindia Belanda diambil alih Jepang, satu bulan setelahnya Belanda pada tanggal 8 April 1942 membentuk komisi yang disebut Netherlands Indies Civil Affair di Melbourne, Australia, untuk menangani urusan pemerintah pelarian Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Desember 1943, Kerajaan Belanda mendeskripsikan keberadaan susunan baru Pemerintah Hindia Belanda dengan pimpinannya Letnan Gubernur Jenderal H. J. Van Mook dan Van der Plas sebagai wakilnya. Nama Netherlands Indies Civil Affair pun diubah menjadi Netherlands Indies Civil Administration.²¹

Upaya pemulihan kekuasaan Belanda atas wilayah Indonesia dilakukan, ketika wilayah Indonesia masih terbagi dalam tanggungjawab SEAC dan SWPC, Belanda telah melakukan kesepakatan dengan dua komando Sekutu di kawasan Asia Pasifik tersebut. Dengan pihak SEAC, pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut telah dibicarakan Van Mook dengan Laksamana Mountbatten sejak tahun 1944. Kesepakatan diformalkan di London pada tanggal 24 Agustus 1945 melalui perjanjian Civil Affair Agreement. Isi pokok perjanjian tersebut antara lain menyebutkan:

- 1) Pada tahap pertama, personil NICA berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab pemerintah militer Sekutu di daerah pendudukan;
- 2) Van Mook sebagai kepala NICA bertanggung jawab pada panglima tertinggi SEAC;
- 3) Secara berangsurangsur wewenang dan tanggungjawab pemerintahan di wilayah tersebut akan diberikan pada NICA²²

²¹ Adi. *Op. Cit.* hlm 4

²² *Ibid.* hlm. 4

Dalam teks perjanjian Netherlands, Staten-Generaal, Tweede Kamer, Enquete-commissie regeringsbeleid 1940-1945, militair beleid, terugkeer naar Nederlandsch-Indie (SA en B) (The Hague, 1956:650f) Syarat-syarat perjanjian ini menetapkan bahwa operasi untuk menduduki kembali Hindia Timur Belanda akan menempuh dua tahap. Tahap pertama, Mounbatten akan mempunyai kekuasaan penuh untuk mengambil tindakan apapun yang dianggapnya layak untuk mengakhiri pertempuran pertempuran di pulau-pulau itu. Pemerintah sipil Hindia Belanda atau NICA, dalam masa permulaan ini tanpa syarat akan tunduk di bawah perintah sekutu. sebaliknya, SEAC tidak akan mengambil over kekuasaan hukum secara resmi dan akan menjaga supaya NICA di beri dukungan sebanyak mungkin sejauh keadaan mengijinkan. Dalam tahap kedua, kekuasaan akan diserahkan kepada Belanda.²³

Jauh sebelumnya pada tanggal 7 Desember 1942, Ratu Wilhelmina berpidato, yang salah satu ucapannya menyatakan, "akan memberikan status dominion kepada Indonesia". Keberadaan pasukan Belanda nantinya, didasari kebijakan Ratu Belanda, Wilhelmina, kemudian, mengumumkan bahwa: "Indonesia akan dijadikan Negara Commonwealth yang berbentuk federasi dan untuk masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sendiri tapi hubungan luar negeri oleh Belanda."²⁴

²³ Ben Anderson. *Op. Cit.* hlm, 157

²⁴ AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I : Proklamasi.* Disjarah dan Angkasa, Bandung. 1977. hlm. 191

Kebijakan Ratu Wilhelmina tersebut dikeluarkan dari pengungsian di Inggris setelah negerinya bertekuk lutut kepada Jerman pada tanggal 14 Mei 1940. Janji manisnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berbentuk Commonwealth, ditopang dengan mendirikan perangkat pemerintahan, yaitu NICA (Netherlands Indies Civil Administration).

Mendekati akhir masa perang dunia ke-II komunikasi antara Inggris dan Belanda terbangun kembali dalam pembahasan pengembalian wilayah kekuasaan jajahan. pada 11 Februari 1944 di kota Chequers perjanjian berisi kerajaan Inggris bersedia membantu kerajaan Belanda memulihkan kekuasaannya di Hindia Belanda.²⁵ Walau menghasilkan kesepakatan, namun perjanjian Civil Affair Agreement baru di resmikan setahun setelahnya

Perjanjian Civil Affair Agreement semula hanya berlaku di Sumatera, Setelah terjadi pengalihan wilayah SWPC ke cakupan wilayah SEAC barulah berlaku di semua wilayah Indonesia. Pada tanggal 4 September 1945 dalam pertemuan di Kandy, Srilanka, Van Mook dan Laksamana Mountbatten menyepakati melaksanakan isi pokok perjanjian Civil Affair Agreement di wilayah Indonesia. Laksamana Mountbatten setelahnya mulai mendapatkan informasi mengenai situasi terakhir yang berkembang di Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan dan mempengaruhi sikap politik yang diambilnya.²⁶

²⁵ John. R.W. Smail. *Op.Cit.* hlm. 67

²⁶ Adi. *Loc. Cit.*

SEAC mengemban suatu misi berat, terlepas melaksanakan Misi Internasional, misi lain untuk pemulihan kekuasaan Belanda dibekas wilayah jajahannya di Indonesia. Belanda yang terhimpun dalam negara sekutu dan Inggris terikat perjanjian dengan Belanda untuk membantu memulihkan negara jajahannya.

Diplomasi yang dilakukan tak seutuhnya bisa dilaksanakan oleh setiap unsur, perjanjian Civil Affair Agreemeent dilakukan oleh pejabat tinggi namun dalam pelaksanaan dilapangan terjadi perbedaan. Militer sekutu seperti mengemban tugas dalam suasana kacau. seketika memerlukan bantuan dan perlunya hubungan kompromi dengan pihak Indonesia seperti minimbulkan pandangan adanya pengakuan dari pemerintahan Soekarno. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman dengan Belanda.²⁷

Situasi politik yang sulit mencengkram orang-orang Inggris. Tujuan awal mereka jelas sekali memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Namun, mereka tidak bersedia melakukan perang kolonial demi kepentingan Belanda. Inggris, beberapa bulan sebelumnya baru menghadapi suatu perang saudara yang dahsyat di Yunani dan mereka tidak ingin perang itu terulang di Indonesia.²⁸ Sikap politik dua kaki dalam menjalankan misi internasional yang melandasi agar dapat terlaksana dengan semestinya.

²⁷ Doulton, *Op. Cit.* hlm. 41

²⁸ Robert Bridson. *Op. Cit.* hlm. 55